



ASOSIASI LAYANAN URUN DANA INDONESIA
(ALUDI)

PERKUMPULAN SECURITIES CROWDFUNDING
INDONESIA

Kantorkuu coworking & office space, Citywalk Sudirman lantai 2,
Jl.KH.Mas Mansyur no.121 RT 10/RW 11, Kel.Karet Tengsin Kec.
Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220.

Memahami Peran Data Protection Officer Dalam Penyelenggaraan Layanan Sistem Elektronik

Senin, 17 Oktober 2022, Pemerintah Indonesia telah secara resmi melakukan pengundangan terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 yang berbicara mengenai Pelindungan Data Pribadi (“UU PDP”). Sebuah *beleid* yang telah lama dinanti oleh masyarakat, UU PDP ini nyatanya memberikan sejumlah rombakan baru, khususnya mengenai mekanisme pelindungan data pribadi masyarakat dalam penyelenggaraan layanan sistem elektronik. Salah satu hal yang ramai diperbincangkan di masyarakat adalah mengenai kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik (“PSE”) dalam menyediakan seorang petugas pelaksana fungsi pelindungan data pribadi atau Data Protection Officer (“DPO”) dalam kegiatan bisnisnya.¹ Lantas, tahukah anda siapa yang dapat menjadi DPO dan apa tugas dari seorang DPO?

Berdasarkan Pasal 53 UU PDP, orang yang dapat menjadi seorang DPO merupakan orang yang berdasarkan profesionalitas, pengetahuan mengenai hukum, praktik Pelindungan Data Pribadi, dan kemampuan untuk memenuhi tugas-tugasnya.² Kemampuan ini secara khusus dapat mengacu kepada kualifikasi yang dijelaskan pada Article 29 Working Party (“WP29”).³ WP29 dalam hal ini telah membuat suatu panduan untuk menjabarkan apa yang dimaksud dengan “kemampuan profesional” yang harus dimiliki seorang DPO. Kemampuan tersebut diantaranya adalah:⁴

1. Dapat melakukan pemetaan kebutuhan regulasi-regulasi yang terkait pelindungan data pribadi.
2. Dapat mengidentifikasi legal basis dari sebuah aktivitas pemrosesan data

¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi*, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, Ps. 54.

² *Ibid.*, Ps. 53.

³ WP29 adalah sebuah badan penasehat independen Uni Eropa untuk Pelindungan Data dan Privasi yang terdiri dari perwakilan tiap negara anggota Uni Eropa, *the European Data Protection Supervisor* dan Komisi Eropa.

⁴ European Commission, “Guidelines on Data Protection Assesment and Determining Wether Processing is Likely to Result in High Risk for The Purposes of Regulation,” <https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items/611236/en>,” diakses 09 November 2021

pribadi.

3. Dapat melakukan penilaian *legitimate interest* jika organisasi menggunakan itu sebagai landasan hukum untuk aktivitas pemrosesan tertentu.
4. Dapat menyusun prosedur dalam menangani permintaan akses subyek data / *data subject access request*.
5. Dapat menilai dan menentukan akses terhadap permintaan data dalam konteks untuk menjawab hak-hak subjek data yang diatur dalam regulasi perlindungan data /privasi.
6. Dapat menyusun kebijakan perlindungan data / privasi.
7. Dapat melakukan audit terhadap implementasi perlindungan data / privasi.
8. Dapat melakukan penilaian risiko terhadap aktivitas pemrosesan data pribadi.
9. Dapat menyusun prosedur *privacy by design and default*.
10. Dapat menentukan kriteria dan melakukan *data protection impact assessment* (DPIA).
11. Dapat melakukan komunikasi yang baik dengan lembaga pengawas.
12. Dapat menyusun dan memberikan materi *training dan awareness*.

Kriteria tersebut sejatinya juga dapat dipenuhi oleh seseorang melalui mekanisme Sertifikasi DPO.⁵ Sehingga apabila seseorang ingin menjadi seorang DPO yang terbukti kompetensinya, orang tersebut dapat mengikuti rangkaian Sertifikasi DPO yang ada di Indonesia. Adapun Pasal 53 ayat (3) UU PDP menjelaskan bahwa seorang DPO dapat berasal dari dalam dan/atau luar perusahaan yang melakukan pemrosesan data pribadi. Dengan kata lain, PSE diperbolehkan untuk menjadikan orang internal perusahaannya untuk dijadikan seorang DPO, namun dengan syarat orang internal perusahaan tersebut memiliki kriteria sebagaimana diatur pada UU PDP tersebut.

Lebih lanjut, seorang DPO nantinya akan memiliki sejumlah tugas dan fungsi. Pasal 54 ayat (1) UU PDP mengatur tugas dan fungsi seorang DPO adalah setidaknya:⁶ (1)

⁵ Asosiasi Praktisi Perlindungan Data Indonesia, "Sertifikasi DPO," <https://appdi.org/sertifikasi-dpo/>, diakses 09 November 2022.

⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi*, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, Ps. 54.



**ASOSIASI LAYANAN URUN DANA INDONESIA
(ALUDI)**

**PERKUMPULAN SECURITIES CROWDFUNDING
INDONESIA**

Kantorkuu coworking & office space, Citywalk Sudirman lantai 2,
Jl.KH.Mas Mansyur no.121 RT 10/RW 11, Kel.Karet Tengsin Kec.
Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220.

Menginformasikan dan memberikan saran kepada pengendali data pribadi atau prosesor data pribadi agar mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang ini; (2) memantau dan memastikan kepatuhan terhadap Undang-Undang ini dan kebijakan pengendali data pribadi atau prosesor data pribadi; memberikan saran mengenai penilaian dampak perlindungan data pribadi dan memantau kinerja Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi; dan (3) berkoordinasi dan bertindak sebagai narahubung untuk isu yang berkaitan dengan pemrosesan Data Pribadi. UU PDP mengatur bahwa dalam setiap menjalankan tugasnya, seorang DPO harus mempertimbangkan risiko terkait pemrosesan Data Pribadi, dengan mempertimbangkan sifat, ruang lingkup, konteks, dan tujuan pemrosesan dari suatu data pribadi tersebut.⁷

Berbicara mengenai kewajiban untuk menyediakan seorang DPO, UU PDP mengatur mengenai bentuk badan atau institusi apa saja yang harus memiliki seorang DPO. Kriteria tersebut yakni:⁸

1. Badan atau institusi yang melakukan pemrosesan data pribadi untuk kepentingan pelayanan publik. Contohnya dapat berupa kementerian atau lembaga pemerintahan lainnya.
2. Badan atau institusi yang memiliki kegiatan inti Pengendali Data Pribadi memiliki sifat, ruang lingkup, dan/ atau tujuan yang memerlukan pemantauan secara teratur dan sistematis atas Data Pribadi dengan skala besar. Contohnya dapat berupa perusahaan finansial, bank, dan perusahaan telekomunikasi.⁹
3. Badan atau institusi pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi yang melakukan kegiatan inti Pengendali Data Pribadi terdiri dari pemrosesan Data Pribadi dalam skala besar untuk Data Pribadi yang bersifat spesifik dan/atau Data Pribadi yang berkaitan dengan tindak pidana. Contohnya dapat berupa rumah sakit atau kantor konsultan.¹⁰

Dalam hal badan atau institusi yang memenuhi kriteria tersebut ditemukan tidak

⁷ *Ibid.*, Ps. 54 ayat (2).

⁸ *Ibid.*, Ps. 53 ayat (1).

⁹Ady Thea DA, "Mengenal Profesi Data Protection Officer dalam UU PDP, "<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-profesi-data-protection-officer-dalam-uu-pdp-lt6345254931470/>" diakses 09 November 2022.

¹⁰ *Ibid.*



**ASOSIASI LAYANAN URUN DANA INDONESIA
(ALUDI)**

**PERKUMPULAN SECURITIES CROWDFUNDING
INDONESIA**

Kantorkuu coworking & office space, Citywalk Sudirman lantai 2,
Jl.KH.Mas Mansyur no.121 RT 10/RW 11, Kel.Karet Tengsin Kec.
Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220.

memiliki seorang DPO dalam melakukan pemrosesan data pribadi, maka badan atau institusi tersebut dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan, penghentian sementara kegiatan, penghapusan data pribadi, hingga denda administratif. Oleh karena itu, penting bagi suatu perusahaan, terkhusus bagi perusahaan yang memiliki kegiatan sebagaimana kriteria Pasal 53 ayat (1) UU PDP tersebut, untuk dapat menyediakan seorang DPO yang melakukan tugas perlindungan data pribadi dalam kegiatan usaha sehari-sehari suatu perusahaan.

Penulis : **Adhityo Adya**



**ASOSIASI LAYANAN URUN DANA INDONESIA
(ALUDI)**

**PERKUMPULAN SECURITIES CROWDFUNDING
INDONESIA**

Kantorkuu coworking & office space, Citywalk Sudirman lantai 2,
Jl.KH.Mas Mansyur no.121 RT 10/RW 11, Kel.Karet Tengsin Kec.
Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Indonesia. *Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi*. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022.

Internet

European Commision, “Guidelines on Data Protection Assesment and Determining Wether Processing is Likely to Result in High Risk for The Purposes of Regulation,” <https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items/611236/en>.” Diakses 09 November 2021.

Asosiasi Praktisi Perlindungan Data Indonesia. “Sertifikasi DPO,” <https://appdi.org/sertifikasi-dpo/>. Diakses 09 November 2022.

Ady Thea DA. “Mengenal Profesi Data Protection Officer dalam UU PDP” <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-profesi-data-protection-officer-dalam-uu-pdp-lt6345254931470/>. Diakses 09 November 2022.